

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI
SULAWESI SELATAN**

SKRIPSI



Oleh:

MAHRAMES

Nim: 10571115516

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2023**

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

**JUDUL PENELITIAN:
PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**SKRIPSI
Disusun dan Diajukan Oleh:**

**MAHRAMES
Nim:105711104616**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2023

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Berproses lambat laun belum tentu gagal, tergesa-gesa juga tidak menjanjikan keberhasilan. Intinya jangan berhenti, terus bergerak, usaha, doa, dan percaya diri, Allah selalu ada disisi kita”

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini kupersembahkan kepada kedua orangtua saudara-saudariku yang senantiasa memberikan limpahan do'a, kasih sayang, memberi semangat dan dukungan, serta penulis mengucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing I Bapak Asdar, SE., M.Si dan Dosen Pembimbing II Ibu Zalkha Soraya, S.E., MM. atas bimbingan dan arahnya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi.



PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung jar Lt. 7. Tel. (0411)866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

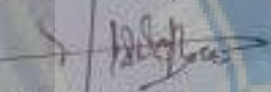
Judul Penelitian : Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi
di Provinsi Sulawesi Selatan
No. Stambuk/NIM : 165231105516
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa penelitian ini telah di periksa, dan di ujikan di depan panitia
penguji skripsi Strata (SI) pada tanggal 30 Agustus 2023 di Program Studi
Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 30 Agustus 2023

Menyetujui,

Pembimbing I


Asdar, S.E., M.Si

NIDN: 0903039102

Pembimbing II


Zaikha Soraya, SE., MM

NIDN: 0904058504

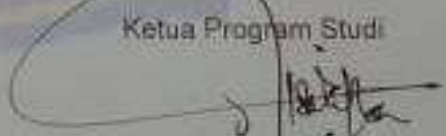
Mengetahui,


Dekan


Dr. H. Andi Jam'an., S.E., M.Si

NBM: 651 507

Ketua Program Studi


Asdar, SE., M.Si

NBM: 0903039102



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI





Skripsi atas Nama **MAHRAMES**, NIM **105711105516**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 0010/SK-Y/60201/091004/2023 M. Pada tanggal 14 Safar 1445 H / 31 Agustus 2023 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

14 Safar 1445 H

Makassar,

31 Agustus 2023 M

PANITIA UJIAN

- | | | |
|------------------|--|---|
| 1. Pengawas Umum | Prof. Dr. Ambo Asse, SE., MM
(Rektor Unismuh Makassar) |  |
| 2. Ketua | Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis) |  |
| 3. Sekretaris | Agusdiyana Suarni, S.E., M.ACC
(WD I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis) |  |
| 4. Penguji | 1. Dr. Muchriana Muchran, SE., M.Si., Ak., CA
2. Asdar, SE., M.Si.
3. Zalkha Soraya, S.E., M.M
4. Muhammad Khaedar Sahib, S.E., M.Ak. |  |



PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alassudin No. 295 gedung Iqr Lt. 7 Tel. (0411)866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Mahrames
Stambuk 105711105516
Program studi Ekonomi Pembangunan
Judul Skripsi Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan
Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan

Demikian ini menyatakan bahwa,

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah asli hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Makassar, 30 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan



Mahrames

105711105516

DI KETAHUI OLEH:

Dekan



H. Andi Jam'an, S.E., M.Si

NPM : 651 507

Ketua Program Studi

Asdar, SE., M.Si

NBM/ 0903039102

HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Sebagai civitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahrames
Stambuk : 105711105516
Program studi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu Pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non esklusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

"Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan"

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar, berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Makassar, 30 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan



Mahrames

105711105516

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai, manakala penulisan proposal penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan”

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yang tercinta dan tersayang. Yang telah senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan do'a yang tulus tanpa pamrih. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan do'a restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Adapun tujuan dari penulisan proposal penelitian ini adalah untuk mempelajari cara pembuatan skripsi pada Universitas Muhammadiyah Makassar dan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Ekonomi Pembangunan. Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moral maupun materiil sehingga proposal penelitian ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. Selaku Rektu Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Asdar. SE., M.Si. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Asdar, SE., M.Si Selaku pembimbing I yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis proposal penelitian selesai dengan baik.
5. Ibu Zalkha Soraya, SE., MM. selaku pembimbing II yang berkenan membantu selama dalam penyusunan proposal penelitian ini.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah telah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Para staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis jurusan ekonomi pembangunan/1angkatan/12016 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terimakasih kepada kedua orantua saya yang telah melahirkan , membesarkan dan mendidik saya hingga saat ini, semoga saya dapat menjadi anak yang berbakti kepada kedua orangtua saya dan menjadi manusia yang bermanfaat.
10. Terimah kasih teruntuk semua keluarga/kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, lesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penuls dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan proposal penelitian ini. Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii sabilil haq, fastabiqul khairat, wassalamu'alaikum wr.wb.

Makassar, 30 Agustus 2023

MAHRAMES

ABSTRAK

MAHRAMES, 10571115516, “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Selatan”. Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Di Bimbing Oleh Pembimbing I Asdar dan Pembimbing II Zalkha Soraya.

Penelitian Ini Bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data yang di olah adalah data sekunder dari Pengeluaran Pemerintah Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012-2021. Hasil dari penelitian ini menunjukkan secara parsial pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan nilai signifikan $20.658 > 2.306$.

Kata Kunci: Pengeluaran Pemerintah, Dan Pertumbuhan Ekonomi.



ABSTRACT

MAHRAMES, 10571115516, “The Influence of Local Government Expenditures on Economic Growth in South Sulawesi Province”. Thesis Development Economics Study Program, Faculty of Economic and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Guided by Advisor I Asdar and Advisor II Zalkha Soraya. This study aims to determine the effect of local government spending on economic growth in South Sulawesi province. The type of research used in this research is quantitative research. The data process is secondary data from Government Expenditure in South Sulawesi Province for 2012-2021. The results of this study show that partially government spending has a significant effect on economic growth in South Sulawesi Province, with a significant value of 20,658 > 2,306.

Keywords: Government Expenditure, And Economic Growth.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
KATA PEGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pertumbuhan Ekonomi.....	12
1. Pengertian Pertumbuhan ekonomi.....	12
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi	15
3. Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi.....	17
B. Pengeluaran Pemerintah	19
1. Pengertian Pengeluaran Pemerintah Daerah.....	19
2. Jenis-Jenis Pengeluaran Pemerintah Daerah	20
C. Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	30
D. Penelitian Terdahulu.....	32
E. Kerangka Pikir & Hipotesis.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	43
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	43
C. Populasi dan Sampel	44
D. Jenis dan Sumber Data	44
E. Variable Penelitian	45
F. Metode Analisis Data	46

BAB IV. HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 52
B. Penyajian Data 54
C. Hasil Analisis Data57
D. Pembahasan 60

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan 61
B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA 62

LAMPIRAN..... 65



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Provinsi se-Sulawesi Tahun 2005-2015
(Dalam Persen)

Tabel 2 Realisasi Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 -
2020 (Juta Rupiah) **Tabel 3.** Penelitian Tedahulu

Tabel 4 Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012-2021

Tabel 5 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan/1



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Konseptual Penelitian 32



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah instrumen yang digunakan untuk melihat dampak pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah dan juga dapat digunakan untuk menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian, dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi negatif dapat menunjukkan adanya penurunan dalam aktivitas perekonomian. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan tujuan utama suatu bangsa agar dapat meningkatkan pembangunan nasional yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta masyarakat bangsa yang difokuskan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan kemampuan nasional.

Pertumbuhan ekonomi yang positif juga merupakan capaian utama bagi seluruh negara, baik bagi negara maju ataupun bagi negara yang sedang berkembang, oleh karena dengan pertumbuhan ekonomi yang positif dapat menarik perhatian para investor untuk menanamkan modalnya ke negara tersebut. Sehingga dengan semakin banyak investor yang masuk maka ketersediaan modal juga akan semakin meningkat sehingga diharapkan dengan investasi yang semakin meningkat, maka akan semakin besar pula kesempatan kerja yang ditawarkan. Dengan demikian angkatan kerja akan semakin banyak yang terserap, sehingga

tingkat pengangguran akan dapat ditekan. Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi daerah adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Nilai PDRB yang digunakan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi dilihat dari nilai konstan. Ada beberapa alasan yang mendasari pemilihan pertumbuhan ekonomi menggunakan produk domestik regional bruto (PDRB), yaitu:

- 1) PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi didalam perekonomian. Hal ini berarti peningkatan PDRB juga mencerminkan peningkatan balas jasa kepada faktor-faktor produksi yang digunakan dalam aktivitas produksi tersebut.
- 2) Batas wilayah perhitungan PDRB adalah negara (perekonomian domestik).
- 3) PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah, atau tercermin melalui pertumbuhan PDRB.

Secara mendasar yang dimaksud pertumbuhan ekonomi adalah proses pertumbuhan output perkapita dalam jangka panjang. Sebagaimana dalam jangka panjang, kesejahteraan tercermin pada peningkatan output perkapita yang sekaligus memberikan banyak alternatif dalam mengkonsumsi barang dan jasa, serta diikuti oleh daya beli masyarakat yang semakin meningkat.

Kuznets mendefinisikan pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan, dan ideologi yang diperlukannya (Jhingan, 2013).

Menurut Sukirno (2013) pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki definisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan. Sedangkan pembangunan ekonomi ialah usaha meningkatkan pendapatan perkapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen. Ada empat faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa yaitu:

- 1) Tanah dan kekayaan alam lainnya (SDA),
- 2) Barang-barang modal dan tingkat teknologi yang mencakup semua investasi baru dalam lahan, peralatan fisik dengan kemajuan teknologi,

- 3) Jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja melalui peningkatan kesehatan, pendidikan dan keterampilan kerja, pertumbuhan populasi yang akhirnya menyebabkan pertumbuhan angkatan kerja,
- 4) Sistem sosial dan masyarakat menentukan sampai dimana pertumbuhan ekonomi dapat dicapai, seperti sikap berhemat yang bertujuan untuk melakukan investasi, sikap bekerja keras dsb. Hal ini sejalan dengan teori ekonomi neo klasik yang menitikberatkan pada modal dan tenaga kerja serta perubahan teknologi sebagai unsur baru.

Sementara itu dalam analisis makro dijelaskan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai. Terdapat 4 komponen pengeluaran agregat dalam perekonomian yaitu : konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, pembentukan modal sektor swasta (investasi), dan export netto (ekspor dikurangi impor).

Pengukuran dalam perekonomian di suatu negara adalah produk domestik bruto (PDB). PDB mengukur aliran pendapatan dan pengeluaran dalam perekonomian selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, nilai PDB berdasarkan harga konstan (PDB Riil) Sehingga

angka pertumbuhan yang dihasilkan merupakan pertumbuhan riil yang terjadi karena adanya penambahan produksi.

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolok ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi, akan tetapi, meskipun telah digunakan sebagai indikator pembangunan, pertumbuhan ekonomi masih bersifat umum dan belum mencerminkan kemampuan masyarakat secara individual. Pembangunan daerah diharapkan akan membawa dampak positif pula terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dicerminkan dari perubahan PDRB dalam suatu wilayah (Suryono, 2010). Keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya diukur melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang berhasil dicapai. Tinggi rendah laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah menunjukkan tingkat perubahan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil dari tahun ke tahun berarti kesejahteraan ekonomi meningkat, sementara perekonomian yang menurun atau pertumbuhan ekonomi dengan nilai negatif berarti turunya kesejahteraan ekonomi. Disisi lain tingkat pertumbuhan ekonomi juga digunakan untuk mengevaluasi tepat atau tidaknya kebijakan yang telah diambil sehubungan dengan peran pemerintah dalam perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2013-2022 masih tetap positif walaupun sifatnya fluktuatif. Selama kurun waktu 2013-2022 Provinsi Sulawesi Selatan memiliki laju pertumbuhan

ekonomi tertinggi kedua se-Sulawesi dengan rata-rata laju pertumbuhan mencapai 6,10%, setelah provinsi Sulawesi Tengah dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar 8,57%. Sedangkan yang paling rendah terjadi Provinsi Sulawesi Barat yaitu 5,02% dan terendah kedua Provinsi Sulawesi Utara sebesar 5,26% rata-rata pertahun.



Tabel 1
Laju Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan Publikasi Produk Domestik
Regional Bruto Provinsi se-Sulawesi
Tahun 2013-2022 (Dalam Persen)

Provinsi	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Rerata
Sulawesi Selatan	7,62	7,54	7,19	7,42	7,21	7,04	6,91	-0,7	4,64	5,09	6,10
Sulawesi Tenggara	7,51	6,26	6,88	6,51	6,81	6,42	6,51	0,65	4,1	5,53	5,74
Sulawesi Tengah	9,38	5,07	15,6	9,98	7,14	6,3	7,15	4,86	11,7	15,2	8,57
Sulawesi Barat	4,34	8,73	7,39	6,03	6,67	6,23	5,56	-2,3	2,57	2,3	5,02
Gorontalo	7,76	7,27	6,23	6,52	6,74	6,51	6,4	-0	2,41	4,04	5,54
Sulawesi Utara	6,38	6,31	6,12	6,17	6,31	6,01	5,65	0,99	4,16	5,42	5,26

Sumber: BPS Nasional 2013-2022, diolah

Pertumbuhan ekonomi sebagai tolak ukur suatu daerah, juga tidak terlepas dari peran pemerintah dalam menyediakan dana untuk membiaya kegiatan pembangunan baik bidang ekonomi maupun non ekonomi. Biaya kegiatan ini sering disebut sebagai pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah daerah diukur dari total belanja langsung dan belanja tidak langsung yang dialokasikan dalam anggaran daerah. Zahari (2017), mengungkapkan bahwa pengeluaran pemerintah yang proposional akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah menjadi subjek penting untuk dianalisis. Secara umum gambaran pengeluaran publik, yaitu infrastruktur fisik atau human capital, dapat mempertinggi pertumbuhan tetapi pengeluaran dapat pula memperlambat pertumbuhan perekonomian suatu daerah.

Dalam sistem ekonomi saat ini, negara sebagai entitas ekonomi berperan penting dalam mengatur dan mengawasi perekonomian serta memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan ekonomi yg tidak dapat dilakukan oleh entitas ekonomi swasta dan domestik lainnya. Untuk itulah diperlukan campur tangan pemerintah dibutuhkan dalam satu perekonomian dan hanya untuk kegiatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Kebijakan pengeluaran pemerintah yang secara langsung dapat mendorong pertumbuhan ekonomi adalah belanja karena variabel ini diwujudkan pembangunan prasarana ekonomi dan sosial. Perkembangan pengeluaran pemerintah yang diukur dari besarnya belanja langsung dan belanja tidak langsung. Pengklasifikasian belanja langsung dan tidak langsung ini digunakan dalam sistem penganggaran pemerintah baik pusat maupun daerah, yaitu sejak penerapan PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah, yang kemudian mengalami revisi secara terus menerus menjadi PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam peraturan yang lama sebagaimana diatur dalam Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, belanja daerah diklasifikasikan menjadi belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja bantuan keuangan.

Kemudian, berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 dan Permendagri No. 77 Tahun 2020, klasifikasi belanja dalam sistem anggaran diperbaiki menjadi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Perkembangan belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, selama periode 2013 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Realisasi Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2013 - 2020 (Juta Rupiah)

Tahun	Belanja Tidak Langsung (BTL)	Belanja Langsung (BL)	Pembiayaan (Pyd)	TOTAL BELANJA	Rasio	
					BTL	BL
2013	3.193.410	1.730.806	93.178	5.017.394	64%	34%
2014	3.446.840	2.153.546	242.455	5.842.841	59%	37%
2015	3.798.198	2.351.406	265.955	6.415.559	59%	37%
2016	4.635.403	1.239.919	856.863	6.732.185	69%	18%
2017	5.924.446	1.715.286	1.051.187	8.690.919	68%	20%
2018	6.538.263	2.783.889	122.405	9.444.557	69%	29%
2019	6.859.106	2.634.320	137.612	9.631.038	71%	27%
2020	7.197.516	2.788.572	388.592	10.374.680	69%	27%

Sumber: BPS Sulawesi Selatan, diolah

Berdasarkan tabel 2, diketahui realisasi belanja pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan cenderung mengalami peningkatan. Pada awal, di tahun 2013, pengeluaran pemerintah sebesar Rp. 5,017 triliun, kemudian di tahun 2020 meningkat menjadi Rp. 10,374 triliun. Porsi belanja tidak langsung lebih besar dibandingkan belanja langsung dan cenderung fluktuatif, dimana belanja tidak langsung pada tahun 2013 sebesar 64% dan pada tahun 2020 menjadi 69%, sedangkan belanja

langsung porsinya pada tahun 2013 sebesar 34% dan pada tahun 2020 menjadi 27%.

Gambaran ini, menunjukkan perlu adanya kerja keras segenap aparaturnya pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk berupaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah, terutama penyediaan dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengingat kondisi dan potensi yang berbeda-beda antara masing-masing daerah membawa konsekuensi adanya perbedaan kemampuan dalam menggerakkan kegiatan pembangunan dan pelayanan publik sehingga dapat menimbulkan berbagai persoalan, terutama menyangkut masalah pengelolaan sumber-sumber potensi daerah, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam kesempatan ini penulis, berkeinginan untuk mengkaji lebih lanjut tentang “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, kemudian penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

Apakah pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi perkembangan kajian keuangan daerah, khususnya terkait analisis terhadap pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah, masyarakat, dan seluruh pihak yang berkepentingan dalam memahami dan mengevaluasi kinerja keuangan daerah, khususnya kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertumbuhan Ekonomi

1. Pengertian Pertumbuhan ekonomi

Secara umum, pertumbuhan ekonomi menunjukkan aktivitas perekonomian suatu negara atau daerah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Menurut Sukirno (2013) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Perekonomian suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan jika jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi ialah perkembangan suatu kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan produksi dari barang serta jasa pada masyarakat (Sadono Sukirno, 2013). Menurut Schumpeter bahwa pertumbuhan ekonomi yaitu suatu peningkatan pada produksi (pendapatan nasional) karena pertumbuhan ekonomi dialami pada laju tabungan dan juga laju pertumbuhan penduduk. Menurut dari beberapa ahli ekonomi pembangunan, teori dari pertumbuhan ekonomi yaitu sebutan yang digunakan untuk menggambarkan keberhasilan

pembangunan negara-negara maju, sementara sebutan pembangunan ekonomi digunakan pada negara-negara berkembang.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan aktivitas perekonomian suatu negara atau daerah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Menurut Sukirno (2013) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Menurut Prasetyo dalam Agung Priambodo (2014), istilah pertumbuhan ekonomi (economic growth) secara paling sederhana dapat diartikan sebagai pertambahan output atau pertambahan pendapatan nasional agregat dalam kurun waktu tertentu misalkan satu tahun. Perekonomian suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan jika jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya.

Menurut Prof. Simon Kuznets (Jhingan, 2013) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya; kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang dibutuhkannya.

Hampir senada dengan Simon Kuznets, menurut Todaro dan Smith (2015) pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan kapasitas produktif dalam suatu perekonomian secara terus menerus atau berkesinambungan sepanjang waktu sehingga menghasilkan tingkat pendapatan dan output nasional yang semakin lama semakin besar.

Menurut pandangan ekonomi klasik, Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus dan John Straurt Mill, maupun ekonom neo klasik, Robert Solow dan Trevor Swan, mengemukakan bahwa pada dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu (1) jumlah penduduk, (2) jumlah stok barang modal, (3) luas tanah dan kekayaan alam, dan (4) tingkat teknologi yang digunakan.

Kuznets (dalam Todaro, 2015), mengemukakan ada enam karakteristik atau ciri proses pertumbuhan ekonomi sebagai berikut:

- 1) Tingkat pertambahan output perkapita dan pertambahan penduduk yang tinggi.
- 2) Tingkat kenaikan total produktivitas faktor yang tinggi, khususnya produktivitas tenaga kerja.
- 3) Tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi.
- 4) Tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi.
- 5) Adanya kecenderungan daerah yang mulai atau sudah maju perekonomiannya untuk berusaha menambah bagian-bagian daerah lainnya sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan

baku.

- 6) Terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai sepertiga bagian penduduk dunia.

Menurut Tambunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi (Elviani, 2018). Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Dengan kata lain, perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan bila pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar dari pada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sadono Sukirno (2013), ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu sebagai berikut:

- a) Faktor SDA (Sumber Daya Alam)

Kekayaan sumber daya alam yang ada di suatu negara meliputi kesuburan tanah, luas tanah, keadaan iklim, jumlah dan jenis hasil hutan, hasil dari laut dan tambang yang diperoleh. Kekayaan alam di suatu negara dapat memudahkan para pelaku usaha untuk membangun perekonomian di negaranya, terutama pada awal proses pertumbuhan ekonomi. Tetapi kekayaan dari SDA saja tidak cukup untuk membangun ekonomi, jika tidak didukung oleh kemampuan masyarakat atau

kemampuan sumber daya manusia untuk mengelola sumber daya alam tersebut.

b) Faktor SDM (Sumber Daya Manusia)

SDM yaitu sebuah potensi atau kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang. SDM merupakan faktor penting dalam proses membangun ekonomi. Dari adanya sumber daya manusia yang terlatih maka akan meningkatkan produktivitas yang dapat mengelola sumber daya alam dengan baik.

c) Faktor Teknologi dan Ilmu Pengetahuan

Dengan adanya teknologi dan ilmu pengetahuan yang berkembang secara cepat maka ini akan mempercepat sebuah proses pembangunan. Dari adanya ilmu pengetahuan ini kemudian dapat menciptakan teknologi yang canggih yang dapat mempermudah suatu pekerjaan manusia. Maka dari itu, jika tidak adanya ilmu pengetahuan maka tidak adanya kemajuan teknologi pada suatu negara tersebut dan tidak dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

d) Sikap Masyarakat dan Sistem Sosial

Sikap masyarakat dan sistem sosial memiliki peran yang sangat penting untuk mewujudkan suatu pertumbuhan ekonomi. Untuk mengkaji suatu masalah dari pembangunan pada negara berkembang, dan para ahli ilmu ekonomi sudah menyatakan bahwasannya pada sistem sosial masyarakat dapat menjadi penghambat masyarakat untuk cara memproduksi secara modern dengan produktivitas yang tinggi.

Selain itu sikap masyarakat dan sistem sosial juga dapat menentukan pertumbuhan ekonomi, sampai mana pertumbuhan ekonomi akan dapat dicapai. Sifat masyarakat ini dapat mendorong besar kecilnya pertumbuhan ekonomi. Apabila didalam masyarakat adanya beberapa masalah pada sikap masyarakat dan sistem sosial yang sangat mengganggu sampai terjadi masalah dalam pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah harus bisa menghilangkan masalah tersebut.

3. Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan faktor terpenting dalam pembangunan. Keberhasilan pembangunan suatu negara/wilayah diukur berdasarkan tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Pengukuran pertumbuhan ekonomi secara konvensional biasanya dengan menghitung peningkatan persentase dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk provinsi maupun kabupaten/kota. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi selama periode tertentu. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diperoleh melalui tingkat pertumbuhan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

Untuk menghitung dan menganalisis pertumbuhan ekonomi di suatu negara yaitu dengan cara menghitung PDB (Produk Domestik Bruto). PDB suatu negara dihitung berdasarkan dari suatu wilayah, yang

artinya semua hasil produksi barang dan jasa dari wilayah di negara tersebut akan dimasukkan kedalam sebuah perhitungan PDB di negara tersebut.

Laju pertumbuhan ekonomi dipresentasikan dalam satuan persen. Jangka waktu yang digunakan yaitu dalam jangka satu tahunan. Berikut merupakan rumus dari laju pertumbuhan ekonomi.

$$R = \frac{(PDB_t - PDB_{t-1})}{(PDB_{t-1})} \times 100\%$$

Keterangan:

R = laju pertumbuhan ekonomi dalam persentase (%)

PDB_t = PDB (Produk Domestik Bruto) di tahun tertentu

PDB_{t-1} = PDB (Produk Domestik Bruto) di tahun sebelumnya

B. Pengeluaran Pemerintah

1. Pengertian Pengeluaran Pemerintah Daerah

Pengeluaran daerah diperoleh dari seluruh pendapatan daerah yang diterima baik dari daerahnya sendiri maupun bantuan dari pemerintah pusat yang akan digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan daerah.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Versi Keynes, pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran bahwa $Y = C + I + G + X - M$. Formula ini dikenal sebagai identitas pendapatan nasional. Variabel Y melambangkan pendapatan nasional sekaligus mencerminkan

penawaran agregat. Variabel-variabel di ruas kanan disebut permintaan agregat. Variabel G melambangkan pengeluaran pemerintah. Dengan membandingkan nilai G terhadap Y serta mengamati dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan pendapatan nasional (Dumairy, 1996)

Teori pembangunan dan pengeluaran pemerintah dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut.

- 1) Tahap awal, pada tahap awal perkembangan ekonomi persentase investasi besar, sebab pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya.
- 2) Tahap menengah, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun peranan investasi swasta sudah semakin membesar.
- 3) Tahap lanjut, pembangunan ekonomi dan aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan program pelayanan kesehatan masyarakat (Mangkoesobroto, 2014).

2. Jenis-Jenis Pengeluaran Pemerintah Daerah

Belanja diklasifikasikan berdasarkan hubungannya dengan aktivitas, sehingga belanja dikelompokkan menjadi 2 bagian.

a. Belanja langsung

Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah daerah. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Selanjutnya, kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

1) Belanja pegawai;

Belanja pegawai dalam kelompok belanja langsung tersebut dimaksudkan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja jenis ini antara lain untuk menampung honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal sebagaimana dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

2) Belanja barang dan jasa;

Belanja barang dan jasa ini mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, dan pemulangan pegawai

3) Belanja modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset.

b. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Seperti belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan oleh

undang-undang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan social, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah dasa, belanja bantuan keuangan dan belanja tak terduga. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Berikut merupakan jenis-jenis belanja tak langsung :

1) Belanja Pegawai

Kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. belanja pegawai dipergunakan untuk:

- a) Belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada pembayaran gaji PNS dan TNI/POLRI
- b) Belanja gaji dokter pegawai Tidak Tetap
- c) Belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada pembayaran gaji pejabat negara;
- d) Belanja uang makan PNS;
- e) Belanja uang lauk pauk TNI/POLRI;
- f) Belanja uang tunggu dan pensiun pegawai negeri dan pejabat negara yang disalurkan melalui PT. Taspen dan PT. ASABRI;

- g) Belanja asuransi kesehatan pegawai negeri;
- h) Belanja uang lembur PNS;
- i) Belanja pegawai honorer yang diangkat dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi unit organisasi pemerintah;
- j) Pembayaran tunjangan sosial bagi pegawai negeri melalui unit organisasi/lembaga/badan tertentu;
- k) Pembayaran uang vakasi;
- l) Pembayaran tunjangan khusus merupakan pembayaran kompensasi kepada pegawai negeri yang besarnya ditetapkan oleh presiden/menteri keuangan;
- m) Belanja pegawai transito merupakan alokasi anggaran belanja pegawai yang direncanakan akan ditarik/dicairkan namun database pegawai pada kementerian negara/lembaga berkenaan menurut peraturan perundang-undangan belum dapat direkam pada aplikasi belanja pegawai satuan kerja (satker) karena belum ditetapkan sebagai pegawai negeri pada satker berkenaan; dan
- n) Pembayaran untuk uang duka wafat/tewas yang besarnya ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Dikecualikan untuk pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal dan/atau kegiatan yang mempunyai output dalam kategori belanja barang.

2) Belanja Bunga

Pembayaran kewajiban atas penggunaan pokok utang (principal outstanding), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari utang yang sudah ada dan perkiraan utang baru, termasuk untuk biaya terkait dengan pengelolaan utang.

Pembayaran bunga utang meliputi antara lain:

- a) Pembayaran kewajiban pemerintah atas bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN), bunga Obligasi Negara, Imbalan Surat¹ Berharga Syariah Negara (SBSN), Bunga Pinjaman Program, Bunga Pinjaman Proyek, dan bunga Utang Luar Negeri melalui penjadualan kembali pinjaman;
- b) Pembayaran kewajiban pemerintah atas diskon SPN dan diskon Obligasi Negara;
- c) Pembayaran Loss on Bond Redemption. Digunakan untuk mencatat beban yang timbul dari selisih clean price yang dibayar pemerintah pada saat pembelian kembali SUN (buyback) dengan carrying value SUN.
- d) Pembayaran diskon SBSN; dan
- e) Denda merupakan pembayaran imbalan bunga atas kelalaian

pemerintah membayar kembali pengembalian kelebihan pajak (restitusi), pengembalian kelebihan bea dan cukai serta imbalan bunga atas pinjaman perbankan dan bunga dalam negeri jangka pendek lainnya.

3) Belanja Hibah

Merupakan belanja pemerintah pusat dalam bentuk transfer uang/barang kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, BUMN/D, dan pemerintah daerah yang bersifat sukarela, tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak perlu dibayar kembali serta tidak terus menerus dan dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah dengan pengalihan hak dalam bentuk uang, barang, atau jasa. Termasuk dalam belanja hibah adalah pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan ke daerah.

4) Belanja Bantuan Sosial

Transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang

ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bansos akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

5) Belanja Subsidi

Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga untuk memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Belanja subsidi diberikan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Belanja subsidi terdiri dari :

a) Energi

Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu, liquefied petroleum gas (LPG) konsumsi rumah tangga dan usaha mikro serta tenaga listrik sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan.

b) Non Energi

Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan barang publik yang bersifat non energi sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan.

4) Belanja Lain-lain

Pengeluaran negara untuk pembayaran atas kewajiban pemerintah yang tidak masuk dalam kategori belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial serta bersifat mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja lain-lain dipergunakan antara lain:

a) Belanja Lain-Lain Dana Cadangan dan Risiko Fiskal

Pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban pemerintah yang bersifat prioritas nasional bidang ekonomi dan jika tidak dilakukan akan berdampak pada capaian target nasional.

b) Belanja Lain-Lain Lembaga Non Kementerian

Pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban pemerintah yang terkait dengan pendanaan kelembagaan non kementerian.

c) Belanja Lain-Lain Bendahara Umum Negara

Pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban pemerintah yang terkait dengan tugas Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara.

d) Belanja Lain-Lain Tanggap Darurat

Pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban

pemerintah yang terkait dengan peristiwa/kondisi negara yang bersifat darurat dan perlu penanganan segera.

e) Belanja Lainnya

Pengeluaran anggaran yang tidak termasuk dalam kriteria 1 – 4 tersebut di atas

5) Belanja Transfer ke Daerah

Semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi Rincian transfer ke daerah antara lain:

a) Transfer Dana Bagi Hasil

Pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah atas penerimaan negara yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat berdasarkan besaran alokasi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Transfer Dana Alokasi Khusus

Pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk pendanaan kegiatan-kegiatan daerah yang bersifat prioritas nasional.

c) Transfer Dana Alokasi Umum

Pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk pendanaan kebutuhan operasional rutin pemerintahan daerah.

d) Transfer Dana Penyesuaian

Pengeluaran anggaran yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan prioritas kebijakan pemerintah pusat.

e) Transfer Otonomi Khusus

Pengeluaran anggaran yang dialokasikan kepada daerah yang ditetapkan sebagai daerah otonomi yang dikhususkan berdasarkan Undang-Undang.

C. Hubungan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pengeluaran pemerintah (government expenditure) adalah bagian dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2013).

Teori Peacock dan Wiseman menyebutkan bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah; dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya GDP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Maka pengeluaran

pemerintah yang diklasifikasikan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung jika meningkat maka menyebabkan GNP (dalam penelitian ini adalah output) meningkat pula.

Teori Peacock dan Wiseman mengenai pengeluaran pemerintah sering disebut sebagai The Displacement Effect, dimana teori ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa memperbesar pengeluaran, sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pungutan pajak.

Dalam teori Peacock dan Wiseman, dinyatakan juga bahwa pertumbuhan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah, dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Peningkatan pada PDB dalam keadaan normal menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah. Apabila keadaan normal tersebut terganggu, misalnya karena adanya perang, maka pemerintah

harus memperbesar pengeluarannya untuk membiayai perang. Salah satu cara untuk meningkatkan penerimaannya tersebut dengan menaikkan tarif pajak sehingga dana swasta untuk investasi dan konsumsi menjadi berkurang. Keadaan ini disebut efek pengalihan (Displacement effect) yaitu adanya gangguan sosial menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah.

Bird mengkritik hipotesa yang dikemukakan oleh Peacock dan Wiseman. Bird menyatakan bahwa selama terjadinya gangguan social memang terjadi pengalihan aktivitas pemerintah dari pengeluaran sebelum gangguan ke pengeluaran yang berhubungan dengan gangguan tersebut. Hal ini akan diikuti oleh peningkatan persentase pengeluaran pemerintah terhadap PDB. Akan tetapi setelah terjadinya gangguan, persentase pengeluaran pemerintah terhadap PDB akan menurun secara perlahan-lahan kembali ke keadaan semula. Jadi menurut Bird, efek pengalihan merupakan gejala dalam jangka pendek, tetapi tidak terjadi dalam jangka panjang (Mangkoesoebroto, 2014).

D. Penelitian Terdahulu

Tabel 3.
Penelitian Tedahulu

No	Judul Penelitian	Hasil
1	Pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Oleh: Rizky Airy Putri; dkk (2021)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja daerah memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi dan belanja daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di

		kabupaten/kota di Provinsi Jambi.
2	<p>Analisis dampak belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif Jawa Timur</p> <p>Oleh: Meilissa Ike Dien Safitri, dkk (2021)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan jika belanja fungsi ekonomi, kesehatan, pendidikan dan PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif pada jangka panjang, sedangkan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif. Pada jangka pendek, belanja fungsi kesehatan dan pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif, akan tetapi belanja fungsi ekonomi, PDRB per kapita, dan tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Kontribusi belanja fungsi ekonomi, fungsi kesehatan, fungsi pendidikan, PDRB per kapita dan tingkat pengangguran terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif yaitu sebesar 47%, sehingga temuan kami mengindikasikan adanya peran dari faktor lain dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif di Jawa Timur, salah satunya yaitu kualitas sumber daya manusia atau dikenal sebagai modal manusia (human capital).</p>
3	<p>Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Analisis Panel Seemingly Unrelated Regression</p> <p>Oleh: Bayu Kharisma & Adji Pratikto</p>	<p>Penelitian bertujuan untuk melihat bagaimana dampak pertumbuhan dari pengeluaran pemerintah di Indonesia, dengan fokus pada beberapa sektor pengeluaran, yaitu sektor pertahanan, pendidikan, kesehatan, pertanian, transportasi dan komunikasi, dan manufacturing.</p>

		<p>Berdasarkan 17 sektor yang diteliti, hanya 6 sektor yang berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu sektor industri, sektor pertanian dan pengairan, sektor transportasi dan perhubungan, sektor lingkungan hidup dan tata ruang, sektor politik dan penerangan media massa, dan keamanan ketertiban. Sementara itu, dari ke enam sektor tersebut, hanya sektor keamanan ketertiban yang berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan ke 5 sektor lainnya berpengaruh secara negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Apabila tidak diperhatikan taraf signifikansinya, hampir keseluruhan sektor pengeluaran pembangunan memiliki pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, hanya 5 sektor yang memiliki pengaruh positif yaitu sektor tenaga kerja, sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan YME, pemuda dan olahraga, sektor perumahan dan pemukiman, sektor ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sektor keamanan dan ketertiban. Akan tetapi hanya sektor keamanan ketertiban yang berpengaruh secara signifikan, sedangkan ke empat sektor lainnya tidak berpengaruh secara signifikan. Hasil ini berbeda dengan kesimpulan Niloy Bose et al (2007), di mana keseluruhan sektor pengeluaran</p>
--	--	--

		<p>pembangunan pemerintah yang berpengaruh signifikan, pengaruhnya adalah positif. Akan tetapi kesimpulan yang sama dihasilkan untuk sektor keamanan dan ketertiban, di mana hasilnya adalah positif dan signifikan.</p>
4	<p>Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bengkulu.</p> <p>Oleh: Merri Anitasari & Ahmad Soleh (2015)</p>	<p>Hasil analisis dengan menggunakan SPSS 16 menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Bengkulu. Jika pemerintah menaikkan pengeluaran pemerintah sebesar 1 miliar rupiah, maka akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,17 % per tahun. Sedangkan pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah kabupaten/kota menunjukkan bahwa dari jumlah 10 kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu, kabupaten Rejang Lebong dan kota Bengkulu yang memiliki hasil bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Kabupaten Bengkulu Utara memiliki pengaruh yang negatif sedangkan 7 kabupaten lainnya memiliki hasil yang positif namun tidak signifikan. Sebagian besar kabupaten di Provinsi Bengkulu dikategorikan sebagai daerah yang baru membangun yang merupakan hasil pemekaran pasca pemberlakuan otonomi daerah. Sehingga dalam jangka pendek pengeluaran pemerintah dianggap belum mampu</p>

		menstimulus kegiatan sektor-sektor perekonomian serta memacu pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.
5	<p>Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali</p> <p>Oleh: Nengah Rai Suda Pratama & Made Suyana Utama (2019)</p>	<p>Pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Investasi memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Artinya pertumbuhan ekonomi merupakan syarat bagi pengurangan kemiskinan. Adanya syarat kecukupannya adalah pertumbuhan tersebut harus efektif mengurangi kemiskinan, pertumbuhan ekonomi hendaklah menyebar di setiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin. Pengeluaran pemerintah dan investasi tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.</p>
6	<p>Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Dan Kemiskinan (Studi Kasus Pada Kota Manado Tahun 2001-2017)</p> <p>Oleh: Rizaldi Kaharuddin; dkk (2019)</p>	<p>Hasil penelitian regresi sederhana tentang pengaruh Belanja Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan, maka dapat ditarik 1. Variabel Belanja Pemerintah memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi, variabel Belanja Pemerintah memiliki pengaruh terhadap Pengangguran, variabel Belanja pemerintah tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan di Kota</p>

		<p>Manado.2. Koefisien determinasi menunjukkan bahwa penelitian variabel ini sudah memiliki pengaruh. Akan tetapi pengaruhnya secara simultan dapat dikategorikan masih rendah, karena hasil perhitungan menunjukkan koefisien determinasi berada dibawah angka yang seharusnya.3. Dari hasil uji asumsi klasik dapat diperoleh kesimpulan bahwa tidak terdapat masalah pada uji autokorelasi juga diperoleh hasil tidak ada masalah autokorelasi pada model dalam 2 penelitian akan tetapi dalam penelitian tentang kemiskinan terdapat masalah autokorelasi.</p>
7	<p>Analisis Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tana Toraja. Oleh: Samuel Randy Tapparan (2020)</p>	<p>Pengeluaran konsumsi rumah tangga di Kabupaten Tana Toraja dari tahun 2010 – 2019 Mengalami tren kenaikan dari tahun ke tahun. Adapun Pengeluaran konsumsi rumah tangga yang tertinggi yaitu pada tahun 2019 dengan jumlah sebesar Rp 4,405,088.76, dan yang terendah yaitu pada tahun 2010 dengan jumlah sebesar Rp 1,574,255.44.</p> <p>Pada Pengeluaran pemerintah Kabupaten Tana Toraja dari tahun 2010–2019 mengalami trend peningkatan dari tahun ke tahun. Adapun pengeluaran pemerintah yang tertinggi yaitu pada tahun 2019 sebesar Rp 1,195,072.73, dan yang terendah itu pada tahun 2010, yaitu sebesar Rp 543,988.11.</p> <p>Hasil tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Toraja dari Tahun 2010 - 2019 mengalami tren yang fluktuatif</p>

		<p>dari tahun ke tahun. Adapun tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Toraja yang tertinggi yaitu pada tahun 2012, sebesar 8,58%, sedangkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terendah yaitu pada tahun 2010, sebesar 6,10%.</p> <p>Hasil bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 - 2019. Hasil Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dikemukakan oleh Hakib (2009) yang mengemukakan bahwa pengeluaran konsumsi pemerintah memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian yang menunjukkan tidak adanya pengaruh pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi ini sangat kontraditif dengan teori keynes yang mengatakan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.</p>
8	<p>Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Barat</p> <p>Rahmah Amalia , Madris , Abd. Rahman Razak (2015)</p>	<p>Uji koefien t menunjukan pengaruh masing- masing variabel independen terhadap kemiskinan. Ringkasan hasil perhitungan pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2.</p>

		<p>Berdasarkan hasil analisis pengaruh antara variabel, maka diperoleh fakta bahwa pengeluaran pemerintah kabupaten berhubungan negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah kabupaten tidak cukup besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bahkan cenderung menurunkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Pengeluaran pemerintah utamanya bagi daerah yang baru berkembang lebih difokuskan pada kegiatan administrasi dan pembangunan infrastruktur bukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Koefisien regresi variabel pengeluaran pemerintah kabupaten terhadap kesempatan kerja berhubungan negatif dan tidak signifikan. Hal ini berarti pengeluaran pemerintah kabupaten secara langsung tidak cukup besar dalam mendorong peningkatan kesempatan kerja. Hasil penelitian ini menunjukkan hubungan pengeluaran pemerintah terhadap kesempatan kerja adalah positif dan signifikan yang mengindikasikan bahwa belanja pemerintah memegang peranan penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan di masyarakat. Pengaruh pengeluaran pemerintah pusat terhadap kemiskinan secara langsung adalah negatif dan tidak signifikan. Hal ini erat kaitannya dengan pengalihan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi dana alokasi khusus dan kemampuan</p>
--	--	--

		fiskal daerah.
9	<p>Pengaruh Belanja Pemerintah Dan Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Data Panel Provinsi Di Indonesia</p> <p>Ade Ananto Terminanto (2017)</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh pemerintah dan pembiayaan bank syariah terhadap pertumbuhan ekonomi regional (provinsi) di Indonesia dengan menggunakan data 33 provinsi untuk periode 2010-2015. Output penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui kebijakan fiskal yang terarah dan terencana. Selanjutnya, pembiayaan bank syariah dalam bentuk model kerja, investasi dan konsumsi terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Dengan demikian, bank syariah sebagai lembaga intermediasi berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional melalui pemberian pembiayaan terhadap sektor usaha produktif. Olehnya, kebijakan fiskal pemerintah melalui anggaran belanja dan pembiayaan sektor perbankan secara empiris menjadi pendorong peningkatan sektor perintaan dalam perekonomian yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan nasional (output).</p>
10	<p>Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi Serta Ketimpangan Pendapatan</p>	<p>Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Edi Sutriyono (2011) tentang pengeluaran pemerintah dan kesempatan kerja. Menurutnya,</p>

<p>Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali</p> <p>Sri Danawati; dkk (2016)</p> 	<p>dari sisi pengeluaran pemerintah yang berupa pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan mendorong penerimaan masyarakat, melalui efek pelipatgandaan (<i>multiplier effect</i>), dimana peningkatan pendapatan tersebut mendorong konsumsi dan tabungan masyarakat, serta peningkatan permintaan secara keseluruhan, sehingga memberi rangsangan bagi produsen untuk menambah investasi/memperluas kapasitas produksi akibatnya akan tercipta kesempatan kerja baru bagi masyarakat. Jadi pengeluaran pemerintah merupakan suatu cara untuk menggerakkan permintaan yang dapat memompakan suatu perekonomian yang sedang tertekan dan memulihkan tingkat kesempatan yang tinggi. Berdasarkan hasil penelitian ini, pengaruh tidak langsung kesempatan kerja terhadap ketimpangan distribusi pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi adalah positif maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomimemediasi pengaruh kesempatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, artinya mediasi pertumbuhan ekonomi sangat diperlukan untuk pengurangan ketimpangan pendapatan</p>
--	--

E. Kerangka Konseptual

Pengeluaran pemerintah (government expenditure) adalah bagian dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah diklasifikasikan berdasarkan hubungannya dengan aktivitas, sehingga belanja dikelompokkan menjadi 2 bagian.

- a) Belanja tidak langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Seperti belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan social, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah dasa, belanja bantuan keuangan dan belanja tak tersangka.
- b) Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah daerah.

Kedua jenis pengeluaran pemerintah daerah ini dinilai memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sebab, belanja pemerintah dapat memicu penyaluran sumber dana yang dapat memperlancar perputaran uang dan potensi perkembangan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini menyusun konsep pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun secara lebih sederhana digambarkan dalam diagram kerangka konseptual sebagai berikut:

Gambar 1
Kerangka Pikir



F. Hipotesis

Adapun hipotesis dari penelitian ini:

Berdasarkan uraian permasalahan, teori, konsep, serta kerangka pemikiran tersebut, maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah diduga pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah daerah yang berupa belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012 - 2021. Penelitian ini bersifat kuantitatif karena menggunakan data yang memerlukan perhitungan dan menggunakan analisa untuk mendiskripsikan data-data yang sudah diperoleh sehingga akan lebih jelas data tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan observasional analitik dengan rancangan time series, untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dalam kurun waktu tertentu. Variabel terikat (variabel Y) dalam penelitian ini ialah pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan, sementara variabel bebas pengeluaran pemerintah (variabel X) yang terdiri dari Belanja Langsung (variabel X1), dan Belanja Tidak langsung (variabel X2).

B. Lokasi Penelitian & Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Selatan yang berlokasi di Jl. Urip Sumoharjo No.269, Panaikang, Kec.

Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 2 bulan terhitung sejak Bulan Mei 2023 hingga Bulan Juli 2023.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Sampel

Sementara kriteria penarikan sampel adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan selama 10 (sepuluh) tahun, dari tahun 2012 sampai 2021.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:

1. Tinjauan Pustaka (*Library Research*)

Tinjauan pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan mempelajari literatur-literatur yang ada berupa buku-buku, karya ilmiah, jurnal atau artikel-artikel terkait, serta mengakses website dan situs-situs yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan langsung di instansi pemerintahan, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

dengan melakukan wawancara (*interview*) dengan pihak yang berkompoten terhadap data yang diperlukan oleh penulis serta pengumpulan data yang dianggap relevan dengan masalah penelitian.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

- 1) Data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka yang termuat dala Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2012-2021, serta data-data lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.
- 2) Data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, baik dari instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun pihak lain yang dianggap kompeten dalam memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian (*field research*) pada instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
- 2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain atau sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini yang sudah

diolah dan didapatkan melalui dokumen-dokumen yang telah tersedia.

F. Variable Penelitian

1. Variabel terikat : Pertumbuhan Ekonomi (Variabel Y)

Analisis pertumbuhan ekonomi adalah untuk mengkaji terhadap perkembangan ekonomi daerah yang dilihat dari PDRB atas harga konstan (PDRB riil).

Keterangan:

$$\begin{aligned} \text{Laju Pertumbuhan Ekonomi} &= \frac{\text{PDRBt} - \text{PDRB t-1}}{\text{PDRB t-1}} \times 100\% \text{ Dimana :} \\ \text{PDRBt} &= \text{PDRB Riil pada tahun t} \\ \text{PDRB t-1} &= \text{PDRB Riil tahun sebelumnya} \end{aligned}$$

2. Variabel Bebas

Variabel X1: Belanja Langsung

Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah daerah.

Variabel x2: Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Seperti belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, belanja bunga, belanja hibah,

belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah dasa, belanja bantuan keuangan dan belanja tak tersangka.

G. Metode Analisis Data

1. Analisis Regresi Linier

Metode analisis data yang digunakan dalam melihat besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan analisis regresi linier model ekonometrika metode Ordinary Least Square (OLS). Sebelum dilakukan analisis regresi linier terlebih dahulu dilakukan pengolahan data dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 22.0.

Persamaan regresi linier model ekonometrika adalah:

$$Y_t = \alpha + \beta X_t + e$$

Persamaan tersebut kemudian diformulasikan dalam bentuk logaritma natural (Ln) yang disesuaikan dengan variabel penelitian, menjadi :

$$\ln PE_t = \ln \alpha + \ln \beta TBD_t + e$$

Dimana :

PE = Pertumbuhan Ekonomi (PDRB atas harga konstan) TBD =
Pengeluaran

Pemerintah (Total Belanja Darah)

Ln = Logaritma Natural

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

t = Periode waktu

e = Error

2. Koefisien Determinasi

Uji determinasi (Uji R²) merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi, atau dengan kata lain angka tersebut dapat mengukur kedekatan garis regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya. Nilai koefisien determinasi (R²) ini mencerminkan besaran variasi dari variabel terikat Y dapat diterangkan oleh variabel bebas X. Bila nilai koefisien determinasi sama dengan 0 (R² = 0), artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali. Nilai R² = 1, artinya variasi dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X.

Dengan kata lain jika R² = 1, maka semua titik pengamatan berada tepat pada garis regresi. Dengan demikian, baik atau buruknya suatu persamaan regresi ditentukan oleh R² nya yang mempunyai nilai antara 0 (nol) dan 1 (satu).

3. Pengujian Hipotesis

Uji t digunakan untuk menguji tingkat signifikan dari pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji dilaksanakan dengan langkah membandingkan t hitung dengan t tabel (Santoso Slamet, 2013:136). Dengan ketentuan jika t hitung > t tabel dan nilai signifikan < 0,05 (α : 5%), maka variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Mengadakan

pengujian bahwa hipotesa yang diajukan diterima atau ditolak maka digunakan rumus t hitung sebagai berikut : /1

$$t = \beta_n / S\beta_n$$

Dimana,

t : t hitung

β_n : koefisien regresi

$S\beta_n$: Standar Error dari Variabel Independen

Jika :

t hitung < t tabel, maka H_0 ditolak

t hitung > t tabel, maka H_0 diterima



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran umum objek penelitian

1. Gambaran umum Provinsi Sulawesi Selatan

Sulawesi Selatan (Sulsel) adalah sebuah provinsi yang terletak di Pulau Sulawesi bagian selatan. Terbagi menjadi 21 kabupaten dan 3 kota. Terletak pada $0^{\circ}12'$ - 8° Lintang Selatan dan $116^{\circ}48'$ - $122^{\circ}36'$ Bujur Timur dengan luas wilayah 45.764,53 km². Berbatasan dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat di utara, Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara di timur, Selat Makassar di barat dan Laut Flores di selatan.

a. Visi dan Misi Provinsi Sulawesi Selatan

Visi Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023 adalah Sulawesi Selatan yang inovatif, produktif, kompetitif, dan berkarakter. Kejelasan tentang makna yang terkandung dalam visi, maka Pemerintah Provinsi melaksanakan misi yang akan dijalankan pada 5 (lima) tahun mendatang sebagai berikut :

1. Pemerintahan yang berorientasi melayani, inovatif, dan berkarakter.
2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel.
3. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif.
4. Pembangunan manusia yang kompetitif dan inklusif.
5. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk sumber daya alam yang berkelanjutan.

1.1 Kondisi Provinsi Sulawesi Selatan

a. Kondisi Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Sulsel pada triwulan 1 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,28 persen dari triwulan 1 2022, dan di atas pertumbuhan nasional sebesar 5,03 persen.

Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) triwulan 1 2023 mencapai Rp 152, 25 triliun. Untuk pendapatan per kapita mencapai Rp. 65,59 juta pada 2022. Penerimaan pajak sebesar 49,31 persen baik pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

b. Kondisi Sosial

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Selatan tahun

2022 sebesar 72,82, Angka Harapan Hidup 70,97,60 tahun 2022. Jumlah penduduk miskin pada September 2022 782,32 ribu jiwa bertambah sebanyak 16,86 ribu jiwa dibanding September 2021 (BPS, 2022). Sampai dengan Februari 2023 tingkat pengangguran 5,26 persen.

b. Kependudukan

Jumlah penduduk Sulawesi Selatan 2023 sebanyak 9.312.019 jiwa dengan jumlah terbanyak di Kota Makassar sebesar 1.436.626 jiwa dan paling sedikit di Kepulauan Selayar sebesar 140.312 jiwa. Mayoritas pekerjaan penduduk adalah petani di sawah dan ladang.

B. Penyajian Data

1. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pengeluaran pemerintah termasuk kebijakan fiskal untuk mengatur perekonomian dan menentukan jumlah pendapatan dan pengeluaran setiap tahun yang berasal dari APBN/APBD. Terdapat dua komponen dari pengeluaran pemerintah yaitu belanja langsung, dan belanja tidak langsung. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal. Sedangkan belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga,

Pengeluaran pemerintah bersumber dari APBD yang merupakan salah satu bagian dari kebijakan fiskal. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi pengeluaran pemerintah daerah yang tercermin dalam APBD di bagi menjadi dua kelompok utama yaitu pengeluaran rutin atau belanja aparatur daerah dan pengeluaran pembangunan atau belanja pelayanan public. Pengeluaran rutin atau belanja aparatur daerah meliputi belanja pegawai, barang, pemeliharaan, perjalanan dinas, pinjaman serta bunga, dan subsidi. Semua jenis pengeluaran tersebut sifatnya merupakan pengeluaran konsumsi.

Tabel 4 Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012-2021

Tahun	Pengeluaran Pemerintah (Juta)
2012	284.808,33
2013	314.506,65
2014	324.716,65
2015	372.958,35
2016	377.108,91
2017	415.588,20
2018	416.774,74
2019	504.321,74
2020	504.478,54
2021	595.171,26

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2022

Table 4 mengemukakan bahwa pengeluaran pemerintah di Sulawesi Selatan terus meningkat dari tahun 2012-2016 lalu terjadi penurunan pada tahun 2017, kemudian tahun 2018-2021 kembali mengalami peningkatan.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu hal dalam perekonomian yang menjadi penilaian terhadap kondisi ekonomi di suatu daerah dengan adanya peningkatan dari produksi barang dan jasa di daerah tersebut. Laju pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan pada tahun 2012-2021 di lihat pada table 5 bahwa laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan setiap tahunnya pertumbuhan ekonomi terendah pada tahun 2020 sebesar -0,70 % sedangkan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2011 sebesar

8,13 %.

Tabel 5 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
2012	8,87
2013	7,62
2014	7,75
2015	7,19
2016	7,42
2017	7,21
2018	7,04
2019	6,91
2020	-0,70
2021	4,27

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2022





C. Hasil Analisis Data

Pengaruh yang ditimbulkan oleh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan 2010-2020 dilakukan analisis regresi linear sederhana dengan uji statistik yaitu uji parsial (uji t) dan koefisien determinasi (R^2) yang akan diolah dengan menggunakan aplikasi SPSS 26, dari hasil olah data diperoleh sebagai berikut :

1. Regresi Linear Sederhana

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.091	45675402.370		.000	1.000
	Pengeluaran Pemerintah	.099	.005	.990	20.658	.000

a. Dependent Variable : Pertumbuhan Ekonomi
Sumber : Data diolah 2023, SPSS 26

Diketahui nilai konstanta (a) sebesar -0.091 sedangkan koefisien regresi (b) sebesar 0.099 sehingga persamaan regresi dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$
$$Y = -0.091 + 0.099X$$

Sehingga dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Konstanta (a) sebesar -0.091 adalah nilai konsistensi variabel pertumbuhan ekonomi
- Nilai koefisien regresi (b) adalah sebesar 0.099, artinya jika pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan sebesar 1% maka akan berdampak pada kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar (0,00099).

2. Uji Parsial (Uji t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.091	45675402.370		.000	1.000
	Pengeluaran Pemerintah	.099	.005	.990	20.658	.000

a. Dependent Variabel : Pertumbuhan Ekonomi
 Sumber : Data diolah 2023, SPSS 26

$$\begin{aligned}
 t\text{-tabel} &= (a/2 : n-k-1) \\
 &= (0.05/2 : 10-1-1) \\
 &= (0.025 : 8) \\
 &= 2.306 \text{ (t tabel)}
 \end{aligned}$$

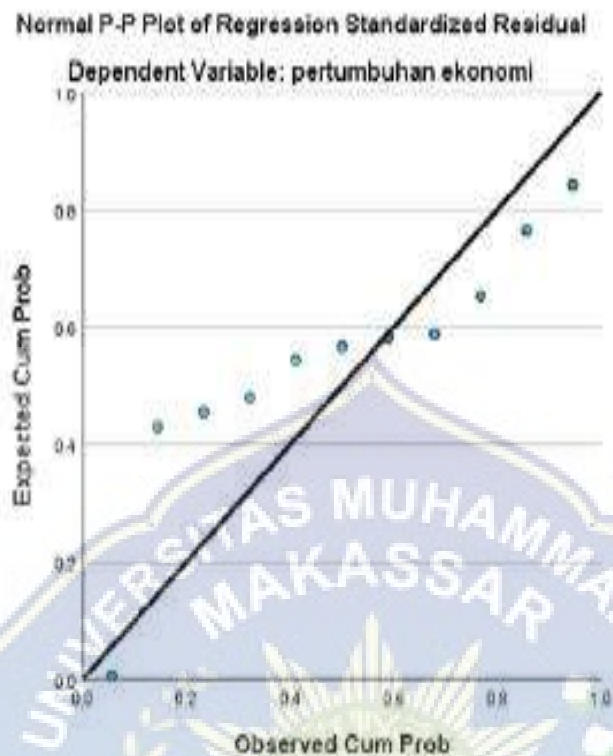
Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai signifikansi pengeluaran pemerintah (X) sebesar 0.000 yang menandakan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 ($0.000 > 0.05$) serta nilai t-hitung 20.658 lebih besar dari t-tabel 2.306 ($20.658 > 2.306$) sehingga dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.990 ^a	.979	.977	151488171.811

a. Predictors: (Constant), Pengeluaran Pemerintah

4. Gambar Uji Normalitas Data



Sumber : output SPSS (Data diolah)

Gambar Probability Plot menunjukkan bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal dan menunjukkan pola distribusi normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas telah terpenuhi dan layak dipakai untuk memprediksi variabel pertumbuhan ekonomi berdasarkan variabel bebas.

D. Pembahasan

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan secara terperinci, maka mengenai pengujian dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sesuai dengan hasil penelitian, nilai koefisien regresi menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini didukung oleh hasil pengolahan data dimana t-hitung 20.658 lebih besar dari t-tabel 2.306 ($20.658 > 2.306$). Hasil penelitian sejalan dengan upaya pemerintah yang menaikkan pengeluaran akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun tidak berlaku secara bersamaan bagi seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Karena pengeluaran tidak secara langsung dan dalam jangka pendek mampu menstimulus kegiatan berbagai sektor perekonomian serta memacu pertumbuhan di daerah tersebut. Adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi menandakan bahwa pengeluaran pemerintah adalah kebijakan yang dapat secara langsung mendorong perwujudan pembangunan sarana dan prasarana ekonomi dan sosial pemerintah sebagai entitas ekonomi berperang penting dalam mengatur dan mengawasi perekonomian. Serta memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang tidak dapat dilakukan oleh entitas ekonomi swasta dan domestik lainnya. Pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan mengimplikasikan bahwa pertumbuhan pengeluaran pemerintah sangat dibutuhkan dalam meningkatkan perekonomian, dalam hal ini adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur dan mengendalikan pengeluarannya baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Pengaruh pengeluaran pemerintah sangat terhadap pertumbuhan ekonomi Di Provinsi Sulawesi Selatan Artinya semakin tinggi pengeluaran pemerintah akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sodik (2007), menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah baik pengeluaran pembangunan maupun pengeluaran rutin mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

PENUTUP**A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa secara parsial pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini sejalan dengan penjelasan bahwa pemerintah yang menaikkan pengeluaran akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Meskipun pertumbuhan tersebut tidak berlangsung secara bersamaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dapat direkomendasikan saran – saran yaitu memperluas akses ekonomi, memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan kapaitas produksi ekonomi yang merata tiap daerah. Pemerataan ekonomi secara langsung akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan.



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, 2021. Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Provinsi se- Sumatera 2013-2022. (dalam Persen) Sulawesi Selatan, 2021,
- BPS Sulawesi Selatan. 2021. Statistik Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2021. BPS Sulawesi Selatan.
- Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan. 2019, Realisasi Belanja Daerah Tahun 2009 – 2019, Sulawesi Selatan.
- Elviani. 2018. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Terhadap Pengangguran dan Kemiskinan Di Kalimantan Timur. JIEM Vol. 3 No. (1)
- Ghozali, Imam. 2011. Analisis Multivariate Lanjutan dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayat, Paidi dan Sirojuzilan. 2010. Kajian Tentang Keuangan Daerah Kota Medan Era Otonomi Daerah Periode 2001-2005.
- Jurnal Perencanaan dan pengembangan Wilayah, Vol 2, No.1 Agustus 2010.
- Jhingan M.L. 2013. Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan. Jakarta: Rajawali Pers
- Kharisma, Bayu & Pratikto, Adji. 2019. Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Analisis Panel Seemingly Unrelated Regression. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Volume 8 No.1 Tahun 2019
- Mangkoesebroto, Guritno. 2014. Ekonomi Publik (Edisi Ketiga). Yogyakarta: BPFE- UGM.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban
- Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Priambodo, Agung. 2014.
- Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012.
- Economics Development Analysis Journal 3. Putri, Airy Putri, dkk. 2021.
- Pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah. Vol. 10 No. 2 (2021) Safitri, Meilissa Ike Dien. 2021.
- Analisis dampak belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif Jawa Timur. Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Volume 6 Nomor 2 Studi Kasus Data Panel Di Indonesia. Vol. 12 Nomor 1. Economic Journal of Emerging Markets. Sugiyono, 2011.
- Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung. Sukirno, Sadono.

2013.

Makro Ekonomi, Teori Pengantar. Penerbit PT. Raja. Grafindo Persada, Jakarta Suryono, Agus. 2010. Dimensi – dimensi Prima Teori Pembangunan. Malang: UB Press. Tambunan, Tulus. 2001.

Perekonomian Indonesia: Teori dan Temua Empiris. Jakarta: Ghalia Indonesia. Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015).

Economic development: The Addison - Wesley. Series in economics. Jakarta: Erlangga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Widarjono, Agus. 2005.

Ekonometrika, Ekonosia, Yogyakarta. Zahari, M. 2017. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jambi. Jurnal Ekonomi Bisnis Ekonomis, Vol 1, No 1 (2017).

Sodik, J. 2007. Pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi regional (Studi Kasus Data Panel di Indonesia). Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 12 No. 1 h. 27-36,





NO	TAHUN	PENGELUARAN PEMERINTAH	PERTUMBUHAN EKONOMI
1	2012	284.808,33	8,87
2	2013	314.506,65	7,62
3	2014	324.716,65	7,75
4	2015	372.958,35	7,19
5	2016	377.108,91	7,42
6	2017	415.588,20	7,21
7	2018	416.774,74	7,04
8	2019	504.321,74	6,91
9	2020	504.478,54	-0,70
10	2021	595.171,26	4,27

LAMPIRAN 1. TABULASI DATA

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.091	45675402.370	.000	1.000
	Pengeluaran Pemerintah	.099	.005	.990	20.658

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.091	45675402.370	.000	1.000
	Pengeluaran Pemerintah	.099	.005	.990	20.658

Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.990 ^a	.979	.977	151488171.811
a. Predictors: (Constant), Pengeluaran Pemerintah				



Dokumentasi Penelitian





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : plsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : 20671/S.01/PTSP/2023 Kepada Yth.
Lampiran : - Kepala Badan Pengelola Keuangan
Perihal : Izin penelitian dan Pendapatan Daerah Prov. Sulsel

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1828/05/C.4-VIII/VI/1444/2023 tanggal 26 Juni 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : MAHRAMES
Nomor Pokok : 10571115516
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **05 Juli s/d 05 Agustus 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 05 Juli 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Drs. MUH SALEH, M.Si.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
Nip : 19690717 199112 1002

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Mahrames

Nim : 105711105516

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	25 %	25 %
3	Bab 3	7 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 23 Agustus 2023

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


Nursinah S. Humi, M.I.P.

NBM. 964 591

BAB I Mahrames 105711105516

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

3%

2

peraturan.bpk.go.id

Internet Source

2%

3

Submitted to Konsorsium PTS Indonesia

Small Campus

Student Paper

2%

4

methosika.net

Internet Source

2%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On



turnitin



BAB II Mahrames 105711105516

ORIGINALITY REPORT

25%
SIMILARITY INDEX

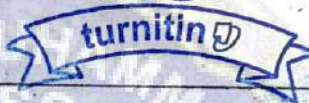
26%
INTERNET SOURCES

11%
PUBLICATIONS

12%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Institut Pemerintahan Dalam Negeri Student Paper	4%
2	pasca.unhas.ac.id Internet Source	4%
3	e-campus.iainbukittinggi.ac.id Internet Source	3%
4	journal.iainkudus.ac.id Internet Source	3%
5	Denny D. Sangkaen, Vecky A.J. Masinambow, Daisy S.M. Engka. "ANALISIS PENGARUH INFLASI BELANJA PEMERINTAH TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN KOTA MANADO", JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH, 2019 Publication	2%
6	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	2%
7	Meilissa Ike Dien Safitri. "ANALISIS DAMPAK BELANJA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP	2%

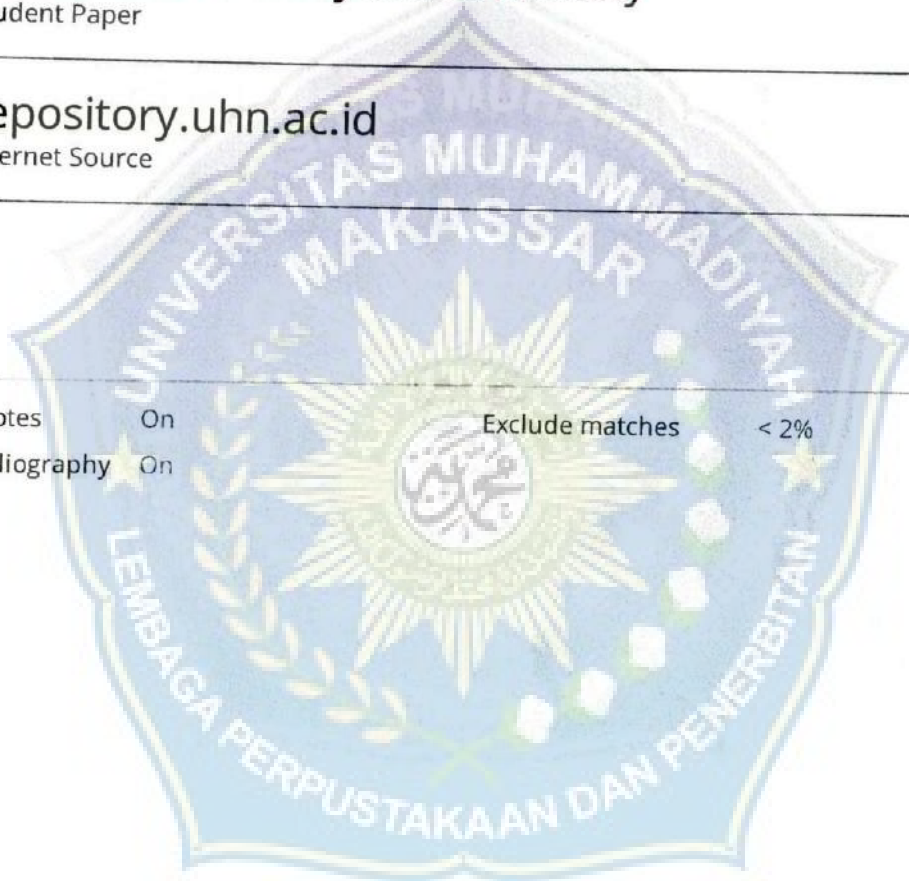


**PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF JAWA
TIMUR", Indonesian Treasury Review: Jurnal
Perbendaharaan, Keuangan Negara dan
Kebijakan Publik, 2021**
Publication

8	jurnal.pancabudi.ac.id Internet Source	2%
9	Submitted to Udayana University Student Paper	2%
10	repository.uhn.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



BAB III Mahrames 105711105516

ORIGINALITY REPORT

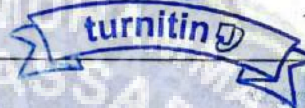
7% SIMILARITY INDEX	9% INTERNET SOURCES	14% PUBLICATIONS	6% STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	qdoc.tips Internet Source	3%
2	text-id.123dok.com Internet Source	2%
3	core.ac.uk Internet Source	2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



BAB IV Mahrames 105711105516

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

jurnaliainpontianak.or.id

Internet Source

2%

2

blog.binadarma.ac.id

Internet Source

2%

3

sulselprov.go.id

Internet Source

2%

4

Chusnada Choirul Hikmah, Retno Sugiharti.
"Dinamika Perekonomian Indonesia Sisi
Pengeluaran: Sebelum dan Setelah Adanya
Covid-19", Jurnal Ecodemica Jurnal Ekonomi
Manajemen dan Bisnis, 2022

Publication

2%

5

disbudpar.sulselprov.go.id

Internet Source

2%

6

repository.unhas.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

BAB V Mahrames 105711105516

ORIGINALITY REPORT

0%
SIMILARITY INDEX

0%
INTERNET SOURCES

0%
PUBLICATIONS

0%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



BIOGRAFI PENULIS



Mahrames Panggilan Ramis. Lahir di makassar 17 Desember 1995 dari pasangan suami istri Bapak Mustafa Syam dan Ibu Syamsiah. Peneliti adalah anak pertama dari tiga bersaudara.

Pendidikan yang di tempuh peneliti yaitu SD Inpres Bangkala III Makassar tahun 2008, SMP Negeri 19 Makassar lulus tahun 2011,

SMA Negeri 13 Makassar Lulus Tahun 2014 dan mulai mengikuti program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Pembangunan Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang, sampai dengan penulis skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Studi Ekonomi Pembangunan Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.